

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham, yaitu sebagian besar perusahaan dimiliki oleh kelompok perusahaan atau pemegang saham mayoritas yang pada penelitian ini selanjutnya disebut sebagai pemegang saham pengendali (**Diyanty, 2012**). Kepemilikan yang terkonsentrasi dapat menyebabkan konflik keagenan yang terjadi bergeser menjadi masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali, bukan lagi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Penyebab terjadinya masalah keagenan tersebut dikarenakan terdapat pemisahan hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali melalui lintas kepemilikan atau struktur piramida antar perusahaan.

Hak kendali pemegang saham dalam perusahaan harusnya diwakili oleh hak arus kas pemegang saham yang timbul dari investasi yang sebenarnya, tetapi karena pengaruh struktur piramida dan partisipasi dalam manajemen maka hak kendali dan hak arus kas mungkin tidak sama. Hal tersebutlah yang menyebabkan pemegang saham pengendali biasanya memiliki hak kendali atas perusahaan melebihi hak arus kas mereka. Perbedaan hak kendali dan hak arus kas mendorong pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi-transaksi dalam

perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, hal ini disebut efek negatif entrenchment yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali.

Wilson (2011) menemukan bahwa manajemen yang mempunyai hak kendali melebihi hak arus kas akan mengurangi tindakan penghindaran pajak. Hasil ini konsisten dengan teori “quite life”, yaitu entrenchment manajemen akan menghindari kegiatan ekspropriasi dan kegiatan legal yang meningkatkan nilai perusahaan jika kedua kegiatan tersebut dalam usahanya membutuhkan biaya yang mahal terhadap manajemen. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian **Rego (2013)** yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan yang lebih terkonsentrasi akan mengurangi tindakan penghindaran pajak karena tindakan penghindaran pajak merupakan tindakan berisiko yang bisa mengeluarkan biaya yang besar pada perusahaan dan manajemen. Saat kepemilikan dan pembuatan keputusan terkonsentrasi pada segelintir pihak, maka manajemen sebagai pemilik perusahaan akan menjadi lebih risk averse dan mengurangi tindakan yang berisiko.

Berbeda dengan penelitian **McGuire et al. (2011)** yang menguji penghindaran pajak pada perusahaan saham kelas ganda dan **Badertscher et al. (2013)** yang menguji penghindaran pajak pada perusahaan yang mayoritas milik manajemen dan PE-backed firms, penelitian ini menguji efek entrenchment pemegang saham pengendali pada perusahaan publik di Indonesia (khususnya perusahaan manufaktur) yang dihubungkan dengan tindakan penghindaran pajak. Menurut **La Porta et al. (1999)**, pemegang saham pengendali yang memiliki hak kendali melebihi hak arus kas dapat terlibat dalam manajemen untuk memutuskan kebijakan dan operasi

perusahaan. Dengan demikian pemegang saham pengendali dapat melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi perusahaan, termasuk tindakan penghindaran pajak dan mentransfer manfaat pajak ke perusahaan lain milik pemegang saham pengendali tanpa harus membaginya dengan pemegang saham non pengendali di perusahaan awalnya.

Struktur kepemilikan pada perusahaan publik di Indonesia lebih banyak dimiliki oleh keluarga sebagai pemegang saham pengendali utama (**Diyanty, 2012**). Penelitian **Sari (2010)** memberikan gambaran awal mengenai perusahaan di Indonesia bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga lebih cenderung melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena mungkin keuntungan berupa penghematan pajak bagi perusahaan di Indonesia lebih besar dari pada kemungkinan terkena denda dari petugas pajak dan kemungkinan rugi karena turunnya harga saham perusahaan atas rusaknya nama perusahaan. Oleh karena itu, penghindaran pajak yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali ini kemungkinan dapat meningkat seandainya pemegang saham pengendali tersebut ialah individu atau keluarga. Adanya dominasi pemegang saham pengendali keluarga inilah yang akan memicu tingginya konflik keagenan antara pemegang saham pengendali keluarga dengan pemegang saham nonpengendali terkait perencanaan pajak.

Penelitian **Mayer (2006)** menyatakan bahwa perencanaan pajak yang terjadi dalam suatu perusahaan tergantung pada dinamika tata kelola di perusahaan tersebut. **Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)** mendefinisikan

tata kelola perusahaan yaitu sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders. Aspek penilaian yang cukup menentukan bagi keberhasilan implementasi tata kelola perusahaan diantaranya ialah komitmen penuh dari peran dewan komisaris, keberadaan komite audit yang efektif, dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan kepada publik (Effendi, 2009).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Keluarga, dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Penyebab terjadinya masalah keagenan yang dikarenakan terdapat pemisahan antara hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali
2. Perbedaan hak kendali dan hak arus kas mendorong pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi-transaksi dalam perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

3. Jika manajemen mempunyai hak kendali melebihi hak arus kas akan mengurangi tindakan penghindaran pajak, karena pihak manajemen dapat mengendalikan keputusan dan kebijakan pada perusahaan.
4. Di Indonesia perusahaan yang dimiliki oleh keluarga lebih cenderung melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga.
5. Perencanaan pajak yang terjadi dalam suatu perusahaan tergantung pada dinamika tata kelola di perusahaan tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka penulis membatasi permasalahan pada pengaruh pemegang saham pengendali, kepemilikan keluarga, dan tata kelola perusahaan (dewan komisaris independen) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur food and beverage tahun 2013 – 2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini terfokus pada:

1. Bagaimana pengaruh pemegang saham pengendali terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur food and beverage pada tahun 2013 – 2017?

2. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur food and beverage pada tahun 2013 – 2017?
3. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur food and beverage pada tahun 2013 – 2017?
4. Bagaimana pengaruh pemegang saham pengendali, kepemilikan keluarga, dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur food and beverage pada tahun 2013 – 2017?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mengestimasi pengaruh pemegang saham pengendali terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui dan mengestimasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui dan mengestimasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
4. Mengetahui dan mengestimasi pengaruh pemegang saham pengendali, kepemilikan keluarga, dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan untuk membandingkan antara teori satu dengan yang lain selama perkuliahan dan dapat mengembangkan daya fikir yang lebih sistematis.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan informasi tentang perbedaan hak kendali dan hak arus kas mendorong pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi dengan mengatur transaksi-transaksi dalam perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pemegang saham pengendali, Sehingga dapat diketahui masalah-masalah yang dihadapi perusahaan mengenai terjadinya agresivitas pajak pada perusahaan. Sehingga diperoleh hasil masalah yang berkaitan mengenai penelitian ini dan agar dapat menjadi suatu acuan.